

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Keterwakilan perempuan di parlemen saat ini bukan hanya menjadi agenda pembangunan global, melainkan juga nasional. Pentingnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi alasan terbentuknya tujuan ini. Perempuan seringkali mendapatkan diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari, oleh sebab itu perempuan perlu ikut andil dalam pengambilan keputusan untuk dapat menyuarakan aspirasi-aspirasi dari kaum perempuan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi tujuan ini, sudah membentuk sebuah peraturan perundang-undangan terkait kuota untuk perempuan dalam parlemen sejak tahun 2003. Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen. Namun hingga saat ini, kuota tersebut tidak pernah terpenuhi. Salah satu hal yang menjadi penghambat sulitnya tujuan ini tercapai ialah besarnya pengaruh budaya patriarki yang ada di Indonesia. Budaya tersebut selalu mengedepankan laki-laki untuk pekerjaan yang bersifat publik, memimpin sesuatu, maupun mengambil keputusan. Beragam stereotip dan kepercayaan dalam budaya patriarki menyatakan bahwa perempuan tidak perlu ikut andil dalam pengambilan keputusan di tingkat apapun.

Sumatera Barat menjadi provinsi di Indonesia yang menganut sistem matrilineal. Sistem ini membuat perempuan memiliki posisi sentral dalam masyarakatnya. Perempuan di Sumatera Barat memiliki berbagai keistimewaan

tersendiri seperti memiliki hak atas properti, berperan untuk mengambil keputusan di Rumah Gadang, dan budayanya yang bersifat matrilineal.

Dengan sejarah dan nilai-nilai filosofis yang ada dalam masyarakat Minangkabau, seharusnya kesetaraan gender dapat tercapai di wilayah ini. Namun nyatanya, kesetaraan gender di Sumatera Barat masih sama seperti wilayah lain yang tidak menggunakan sistem matrilineal. Bahkan pada tahun 2019, Sumatera Barat menjadi provinsi ketiga terendah untuk indeks pemberdayaan perempuannya. Indikator terendah terletak pada rendahnya partisipasi perempuan di parlemen.

Rendahnya partisipasi perempuan di parlemen ini disebabkan oleh berbagai hal seperti rendahnya kemampuan berpolitik perempuan karena kurangnya wadah perempuan untuk mencari pengalaman dan belajar berpolitik, kondisi sosial dan budaya pada masyarakat yang bias gender masih menciptakan stereotip dan subordinat yang menggoyahkan kredibilitas perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, serta adanya *cost politic* yang besar juga menjadi hambatan bagi perempuan di Sumatera Barat untuk mencalonkan diri sebagai anggota parlemen. Terhambatnya akses perempuan untuk memenuhi sumber daya yang dapat memungkinkan perempuan dalam berpolitik, membuat perempuan akhirnya sulit dalam menentukan pilihannya. Rendahnya kemampuan perempuan untuk memilih mempengaruhi tindakan yang diambil oleh perempuan dan berdampak pada tujuan yang ingin dicapai.

Oleh sebab itu, berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa rendahnya partisipasi perempuan di parlemen Sumatera Barat disebabkan oleh kondisi dan masyarakat yang belum ramah gender, serta kurangnya dukungan dari para pemangku kepentingan seperti

partai politik dan pemerintah untuk mendorong keterlibatan perempuan di parlemen. Meskipun secara filosofis, nilai-nilai dalam sistem matrilineal seperti garis keturunan diturunkan melalui ibu sehingga perempuan menduduki posisi sentral, perempuan mendapat hak atas properti, dan memiliki suara dalam rapat adat, namun secara praktikal, sistem matrilineal di Sumatera Barat belum memampukan perempuan untuk berdaya. Budaya yang berkembang pada masyarakat Sumatera Barat tetaplah budaya patriarki seperti daerah di Indonesia pada umumnya, di mana laki-laki memiliki kekuasaan dominan pada ranah publik yang membuat sulitnya perempuan untuk turut berpartisipasi di ranah tersebut.

5.2. Saran

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan masih membutuhkan perbaikan. Namun penulis berharap penelitian ini dapat memberikan penjelasan tentang hal-hal yang masih menjadi hambatan dalam mendorong keterwakilan perempuan di parlemen sebagai wujud dari implementasi agenda pembangunan global. Oleh sebab itu, penulis berharap penelitian selanjutnya dapat mengisi kekurangan yang masih ada dalam kepenulisan ini.

